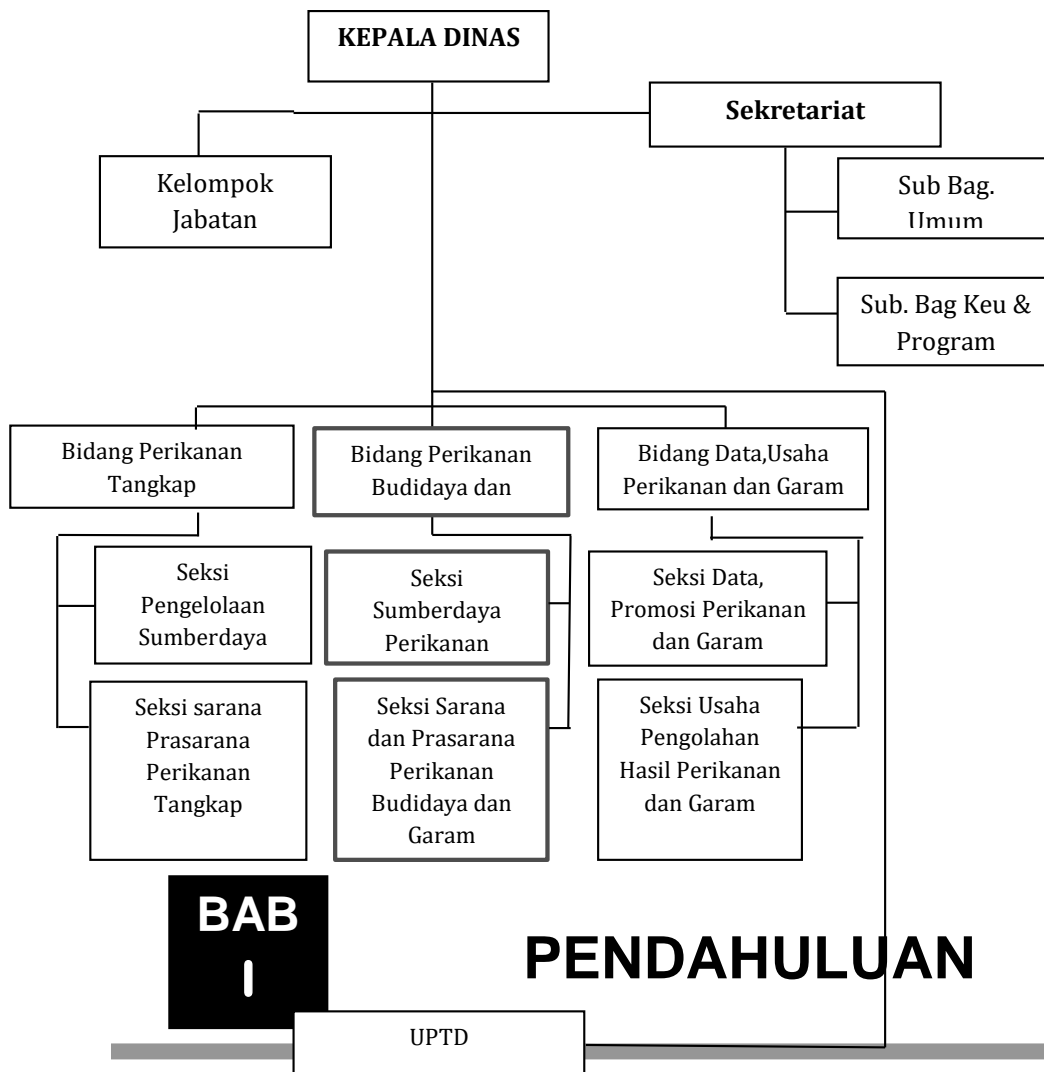


**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas di Kabupaten Sampang dan Keputusan Bupati Sampang nomor 63 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut :



**1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting

Personel Dinas Perikanan Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Jabatan struktural terdiri dari sekretaris, bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap dengan total karyawan sebanyak 24 orang. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :

**1. Kepala Dinas;**

**2. Sekretaris, membawahi :**

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program;

**3. Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan, membawahi :**

- a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Kenelayanan;

**4. Bidang Perikanan Budidaya dan garam, membawahi :**

- a. Seksi Sumberdaya Perikanan Budidaya dan Garam; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Garam;.

**5. Bidang Data, Usaha Perikanan dan Garam, membawahi :**

1. Seksi Data, Promosi Perikanan dan Garam; dan
2. Seksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam;

**6. UPTD Dinas ; dan**

**7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN**

Dinas perikanan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh sekretariat, sub bagian umum, sub bagian keuangan dan program bidang perikanan budidaya dan bidang perikanan tangkap serta bidang data, usaha Perikanan dan Garam.

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **a. Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan dan Program**, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2. Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan**

Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan tangkap dan kenelayanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap dan kenelayanan;
- Perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;
- Perumusan kebijakan teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;
- Perumusan kebijakan Pembinaan dan pengembangan organisasi/kelembagaan nelayan;
- Perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu perikanan tangkap dan Kenelayanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan identifikasi penerapan teknologi penangkapan ikan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.
- Melaksanakan koordinasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya perikanan tangkap.
- Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan perikanan tangkap dan penyediaan fasilitas keselamatan berlayar;
- Melaksanakan pencatatan kapal perikanan dibawah 10GT (Gross Tonage);
- Melaksanakan program pendampingan dan fasilitasi kemitraan bagi nelayan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan.

**b. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Kenelayanan**, mempunyai tugas:

- Melaksanakan inventarisasi terhadap pembangunan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;

- Melaksanakan koordinasi, perlindungan dan pemberdayaan kenelayanan;
- Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan Kenelayanan;
- Melaksanakan inventarisasi kelengkapan, peralatan penunjang dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kewenangan Daerah;
- Melaksanakan pengembangan diversifikasi usaha, pendataan perikanan tangkap dan Kenelayanan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kenelayanan.

**c. Seksi Usaha, Investasi dan Logistik Perikanan**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan tangkap;
- Melaksanakan pembinaan kelompok usaha Perikanan Tangkap, Usaha Pengolah dan Pemasar Ikan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- Melaksanakan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT (*Gross Tonnage*) dan Identifikasi alat tangkap dan produksinya;
- Melaksanakan Pengawasan dan Penanganan Mutu hasil perikanan tangkap;
- Melaksanakan Identifikasi Usaha Perikanan Tangkap, Pengolah dan Pemasar Ikan;
- Melaksanakan survei dan Monitoring harga pasar; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

### **3. Bidang Perikanan Budidaya dan Garam**

Bidang Perikanan Budidaya dan Garam mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perikanan budidaya dan garam. Untuk melaksanakannya, Bidang Perikanan Budidaya dan

garam mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dan evaluasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan garam;
- Perumusan, pemetaan dan pengembangan wilayah serta konservasi perikanan budidaya dan garam;
- Perumusan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya dan garam serta kelembagaan pembudidaya ikan dan petambak garam;
- Pembinaan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan pengendalian lingkungan budidaya;
- Perumusan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**a. Seksi Sumberdaya Perikanan Budidaya dan Garam** mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya dan garam serta kelembagaan pembudidaya ikan dan petambak garam
- Menyiapkan bahan bimbingan dan melaksanakan pelatihan teknologi budidaya ikan dan garam;
- Melakukan inventarisasi produksi perikanan budidaya dan garam serta pemetaan kawasan perikanan budidaya dan garam;
- Melakukan inventarisasi identifikasi dan evaluasi kelestarian dan pemulihan sumber daya perikanan budidaya dan garam
- Melakukan fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan budidaya

**b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Garam**, mempunyai tugas :

- Melakukan inventarisasi dan identifikasi Penggunaan Sarana dan Prasana perikanan budidaya dan garam

- Melakukan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam;
- Melakukan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya dan garam
- Melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan ikan dan pengendalian lingkungan perikanan budidaya;
- Melaksanakan fasilitasi pencatatan atau perijinan usaha perikanan budidaya dan garam; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

#### **4. Bidang Data, Usaha Perikanan dan Garam**

Bidang Data Usaha Perikanan dan Garam mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang data, usaha perikanan dan garam. Untuk melaksanakan tugas di atas bidang data dalam rangka usaha perikanan dan garam mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan pengolahan, penyediaan dan penyajian data perikanan dan garam
- Perumusan kebijakan promosi produk perikanan dan garam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

##### **a. Seksi Data, Promosi Perikanan dan Garam** mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengolahan, penyajian data dan informasi perikanan dan garam
- Melaksanakan promosi produk perikanan dan garam;



- Melakukan kegiatan peningkatan konsumsil ikan;
- Melaksanakan survei dan monitoring harga pasar hasil perikanan dan garam;
- Melaksanakan inventarisasi data produksi pengolahan hasil perikanan dan garam; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang data, usaha perikanan dan garam

**b. Seksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam, mempunyai tugas :**

- Melaksanakan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil perikanan dan garam serta penguatan usaha dan kelembagaan pengolah dan pemasar;
- Melaksanakan pembinaan peningkatan investasi, penumbuhan pelaku usaha pengolahan produk hasil perikanan dan garam;
- Melaksanakan peningkatan pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan Garam;
- Melaksanakan Standarisasi, penanganan mutu hasil perikanan dan Garam;
- Melaksanakan diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan garam;
- Melaksanakan inventarisasi pola kemitraan dan akses pasar produk perikanan dan Garam; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang data, usaha perikanan dan Garam

**c. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan fungsional yang dimaksud untuk jenjang jabatan fungsional muda sampai dengan pratama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala sub bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Sedangkan untuk jenjang jabatan fungsional Madya keatas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris atau Kepala bidang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Dinas Perikanan Kabupaten Sampang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas:

- Perumusan kebijakan bidang Perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perikanan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN**

Hasil analisa isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sampang diantaranya :

1. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan Pembangunan Perikanan Daerah;
2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan perikanan;
3. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan budidaya
4. Masih kurangnya sarana prasarana bidang Perikanan



5. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil Perikanan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat;
6. Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan teknis di bidang Perikanan
7. Optimalisasi sistem Pengendalian dan evaluasi perencanaan program Perikanan
8. Pelayanan Publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
9. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan social bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan

### **1.3 CASCADING DINAS PERIKANAN**

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Perikanan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

**Tabel 1.1 Pohon Kinerja/Cascading Dinas Perikanan Tahun 2021**

TUJUAN		SASARAN (Level 0)		PROGRAM (Level 1)		KEGIATAN (Level 2)		SUB KEGIATAN (Level 2)	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	1 Meningkatkan produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1 Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Jumlah produksi perikanan budidaya	1 Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	1 Pemetaan potensi budidaya ikan di darat
			Persentase peningkatan produksi garam rakyat		2 Jumlah produksi garam rakyat		Jumlah produksi garam rakyat	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1 Pembangunan balai benih ikan
			Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)						2 Normalisasi saluran tambak
			Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)						3 pembangunan rehabilitasi unit pembenihan rakya (UPR)
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)						4 Pembangunan jalan produksi

TUJUAN		SASARAN (Level 0)		PROGRAM (Level 1)		KEGIATAN (Level 2)		SUB KEGIATAN (Level 2)							
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR						
			Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)					3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1	Pembeniaan /tamu lapang pengendalian dan pengamatan hama dan penyakit ikan				
			Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan			2	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	1	Jumlah produksi perikanan budidaya	1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan	1	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengembangan budidaya		
								2	Jumlah produksi garam rakyat	2	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	Jumlah peserta magang/pelatihan/studi lapang ke sentra budiday/garam ke daerah lain		
				2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan	1	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	1	Update data perikanan

TUJUAN		SASARAN (Level 0)		PROGRAM (Level 1)		KEGIATAN (Level 2)		SUB KEGIATAN (Level 2)				
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			
						Air yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota						
					2	Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)	2	Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1	Jumlah KUB PT yang mendapatkan fasilitas sarana penangkapan ikan
										2	Jumlah KUB PT yang mendapatkan fasilitas pembelajaran rajungan	
									3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1	Jumlah lokasi restocking benih
											2	Jumlah kelompok penenrima alat keselamatan saat melaut

TUJUAN		SASARAN (Level 0)		PROGRAM (Level 1)		KEGIATAN (Level 2)		SUB KEGIATAN (Level 2)							
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR						
						2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1	Jumlah Nelayan yang dibina		
								2	Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)			2	Jumlah lokasi nelayan yang dilakukan diversifikasi usaha bagi nelayan		
										2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1	Jumlah Nelayan yang mendapatkan fasilitas bantuan premi asuransi nelayan		
												2	Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas sertifikat tanah nelayan		
				3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Persentase produksi ikan yang diolah	1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolah Ikan dalam 1 (satu)	1	Persentase produksi ikan yang diolah	1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	1	Jumlah kelompok yang menerima sarana pengolahan

TUJUAN		SASARAN (Level 0)		PROGRAM (Level 1)		KEGIATAN (Level 2)		SUB KEGIATAN (Level 2)					
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR				
						Daerah Kab/Kota		dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	hasil perikanan				
					2	Angka konsumsi ikan perkapita/ta hun	2	Angka konsumsi ikan perkapita/ta hun					
					3	Jumlah produk olahan ikan yang bermutu	3	Jumlah produk olahan ikan yang bermutu					
						2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	Persentase produksi ikan yang diolah	1	Penyediaan Data dan Informasi UsahaPemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1	Jumlah Updating Data Perikanan
								2	Angka konsumsi ikan perkapita/ta hun				
								3	Jumlah produk				



TUJUAN		SASARAN (Level 0)		PROGRAM (Level 1)		KEGIATAN (Level 2)		SUB KEGIATAN (Level 2)	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
							olahan ikan yang bermutu		
						1 Pembinaan Mutu dan Keamana Hasil Perikanan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Miro dan Kecil	1 Persentase produksi ikan yang diolah	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolah dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil	1 Jumlah pelaksanaan study banding
							2 Angka konsumsi ikan perkapita/ta hun		2 Jumlah peserta study banding
							3 Jumlah produk olahan ikan yang bermutu		

#### **1.4 PETA PROSES BISNIS DINAS PERIKANAN**

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

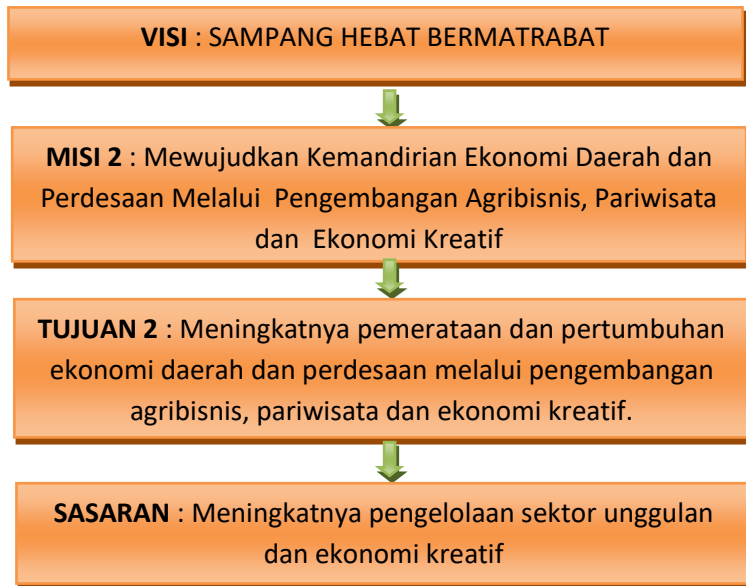
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

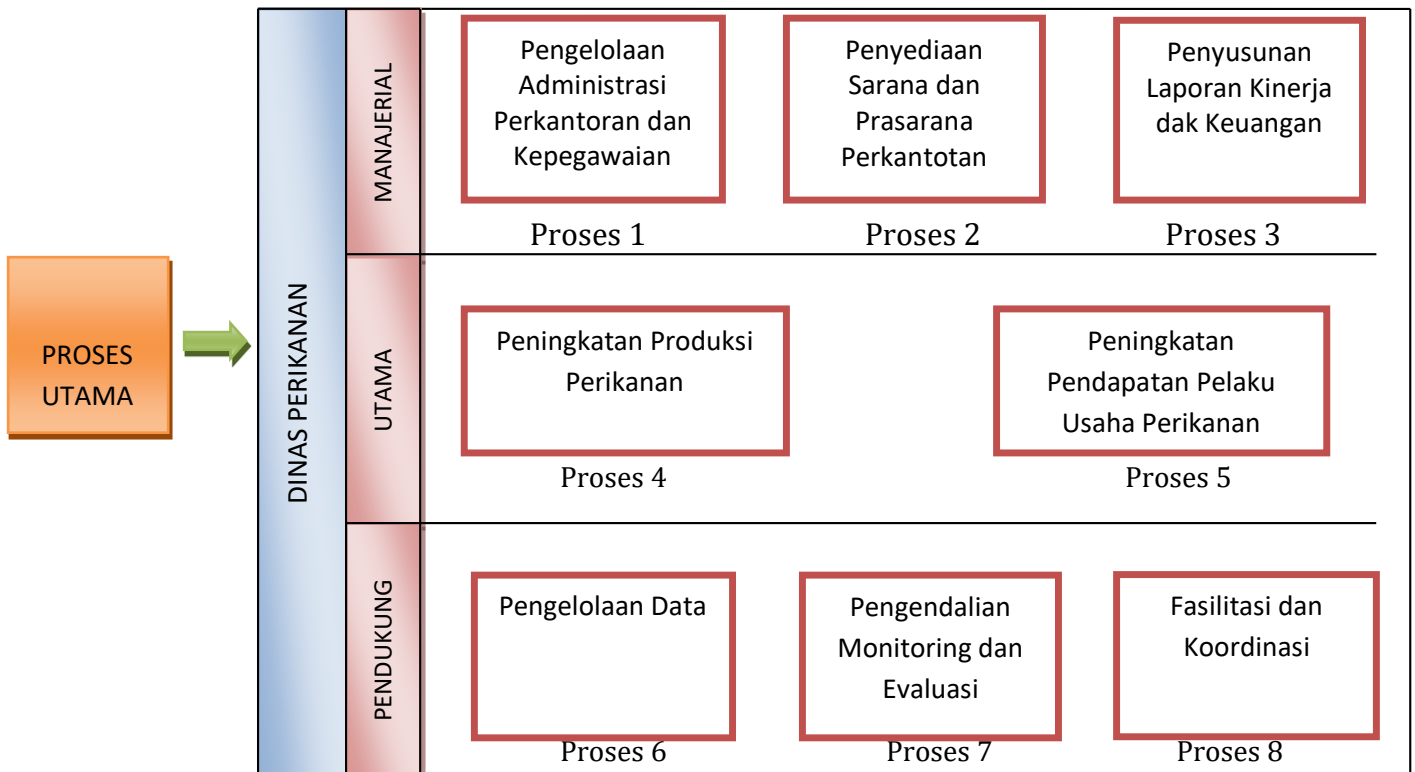
Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.

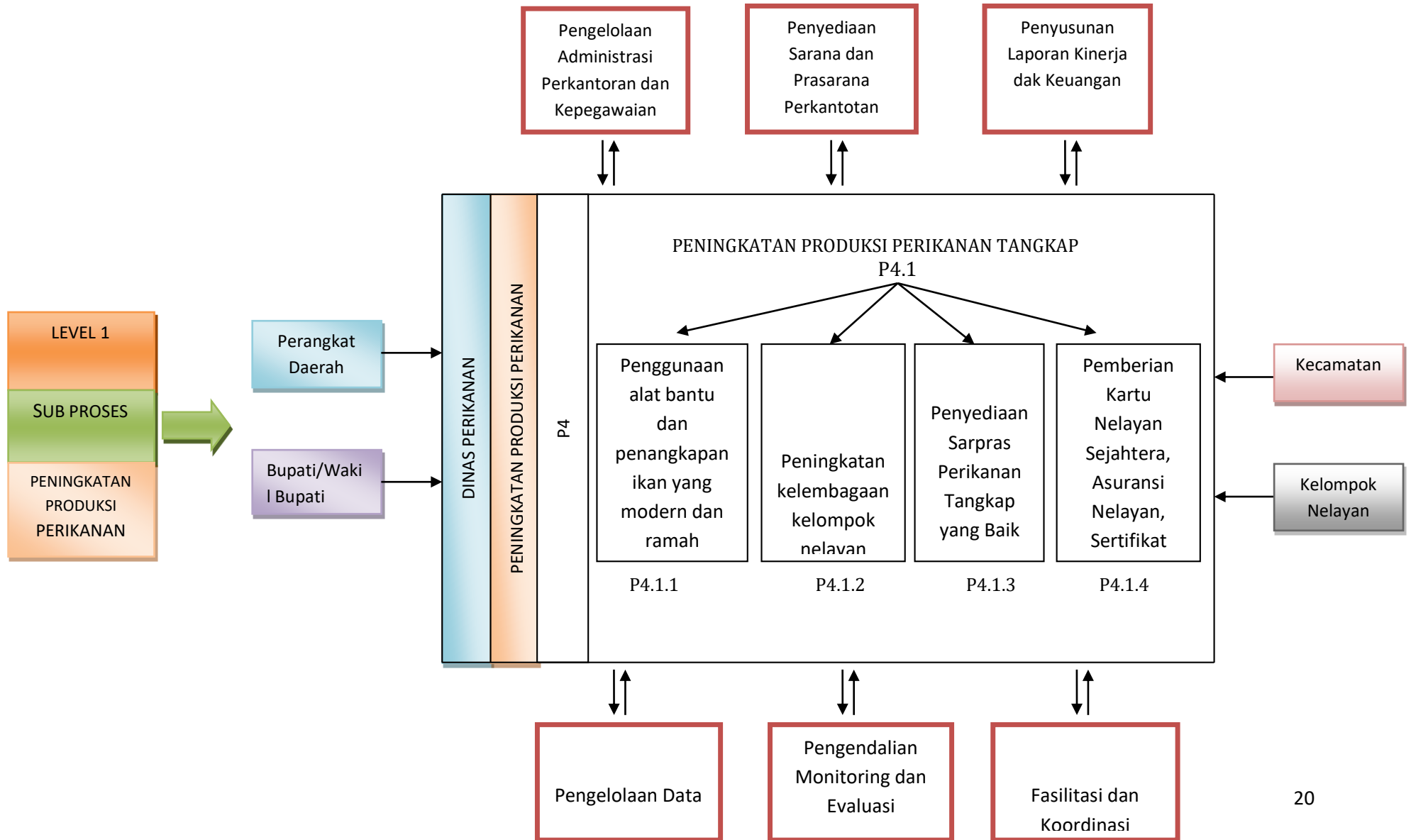
**PETA PROSES  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

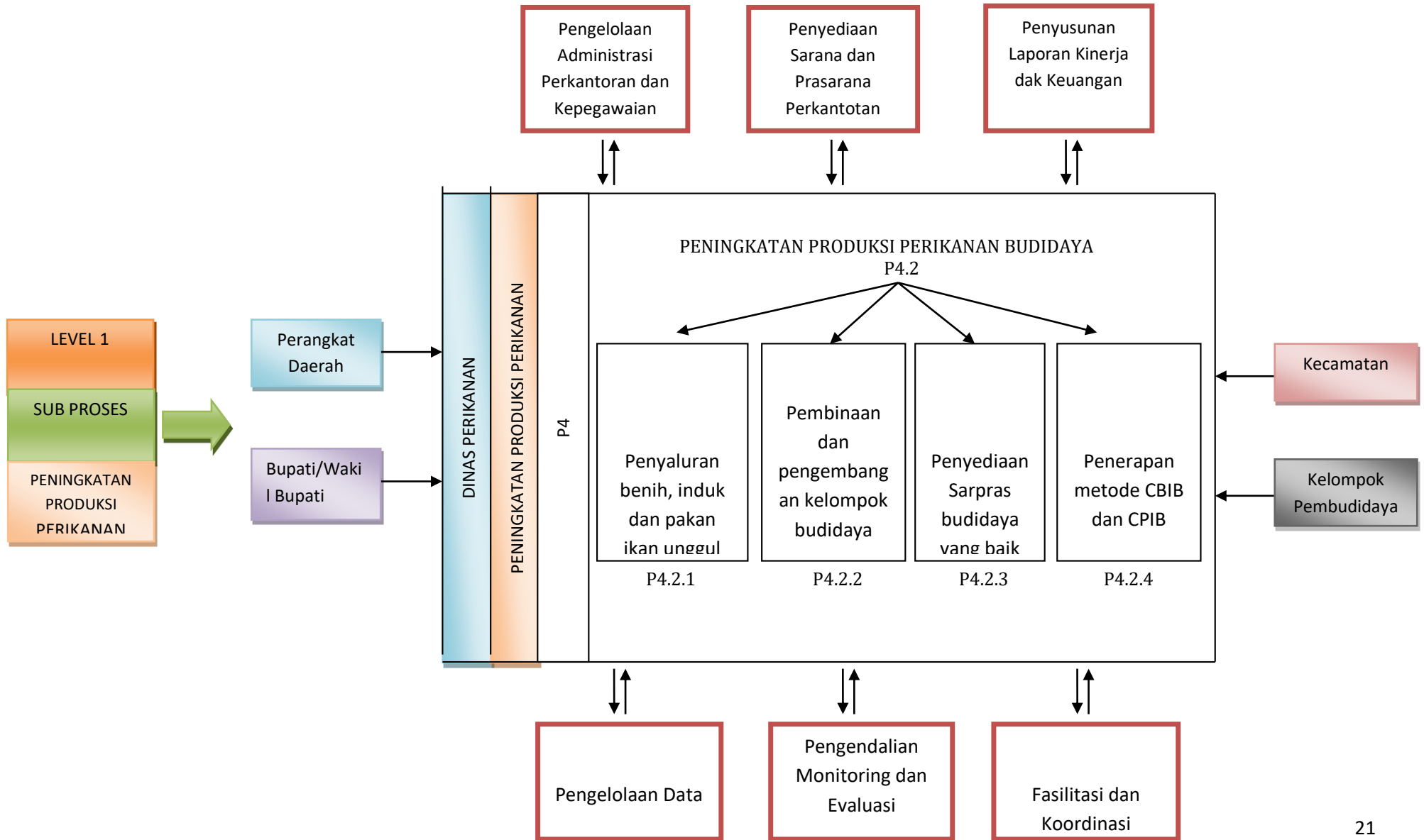


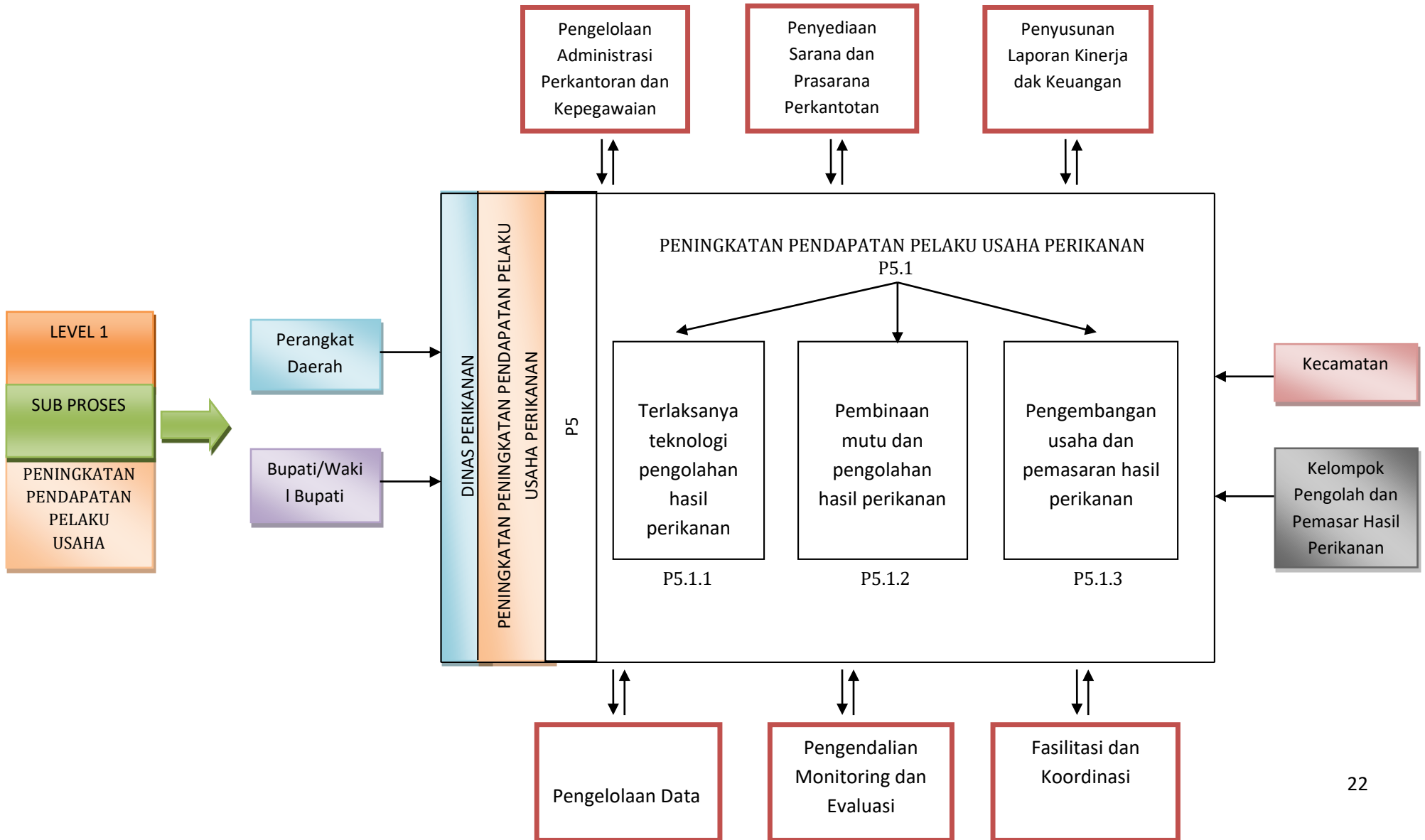
**PETA PROSES BISNIS  
DINAS PERIKANAN**

LEVEL 0

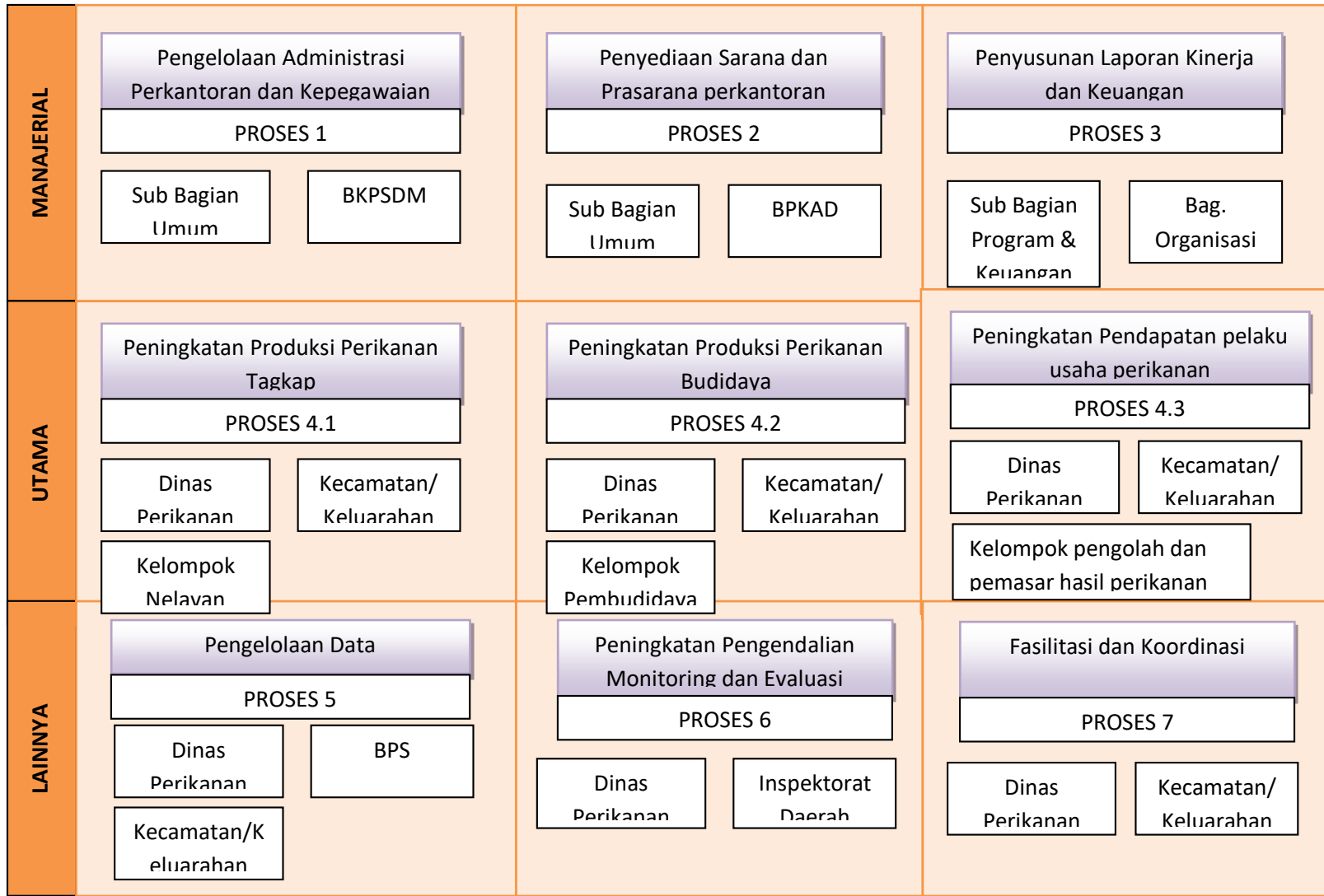




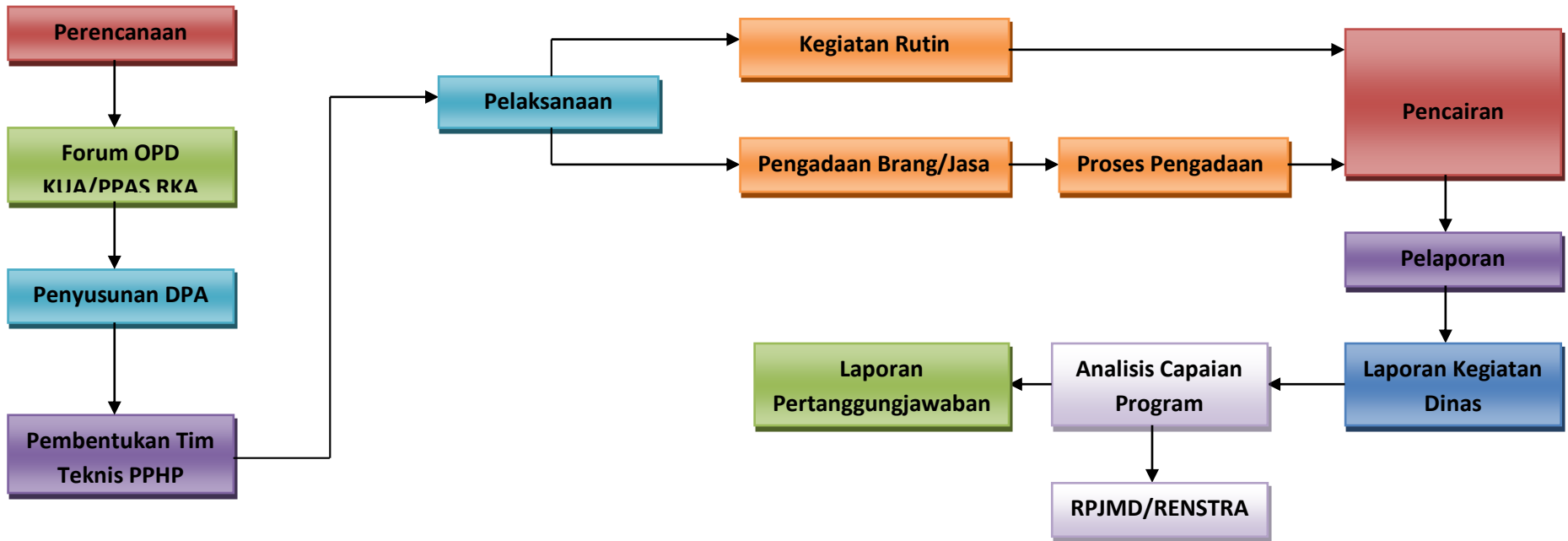




**PETA RELASI**  
**DINAS PERIKANAN**

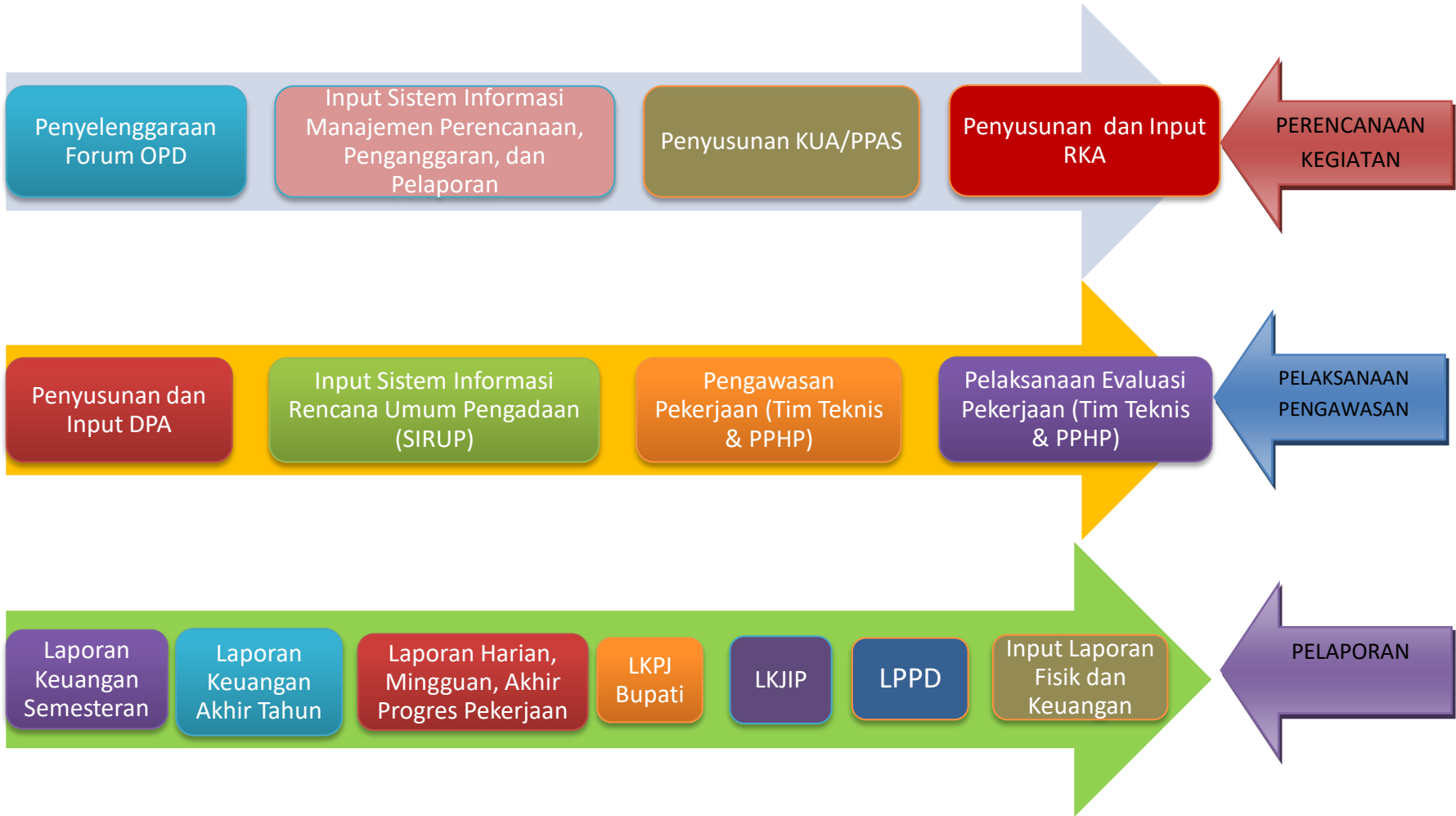


PROSES BISNIS PENDUKUNG  
DINAS PERIKANAN





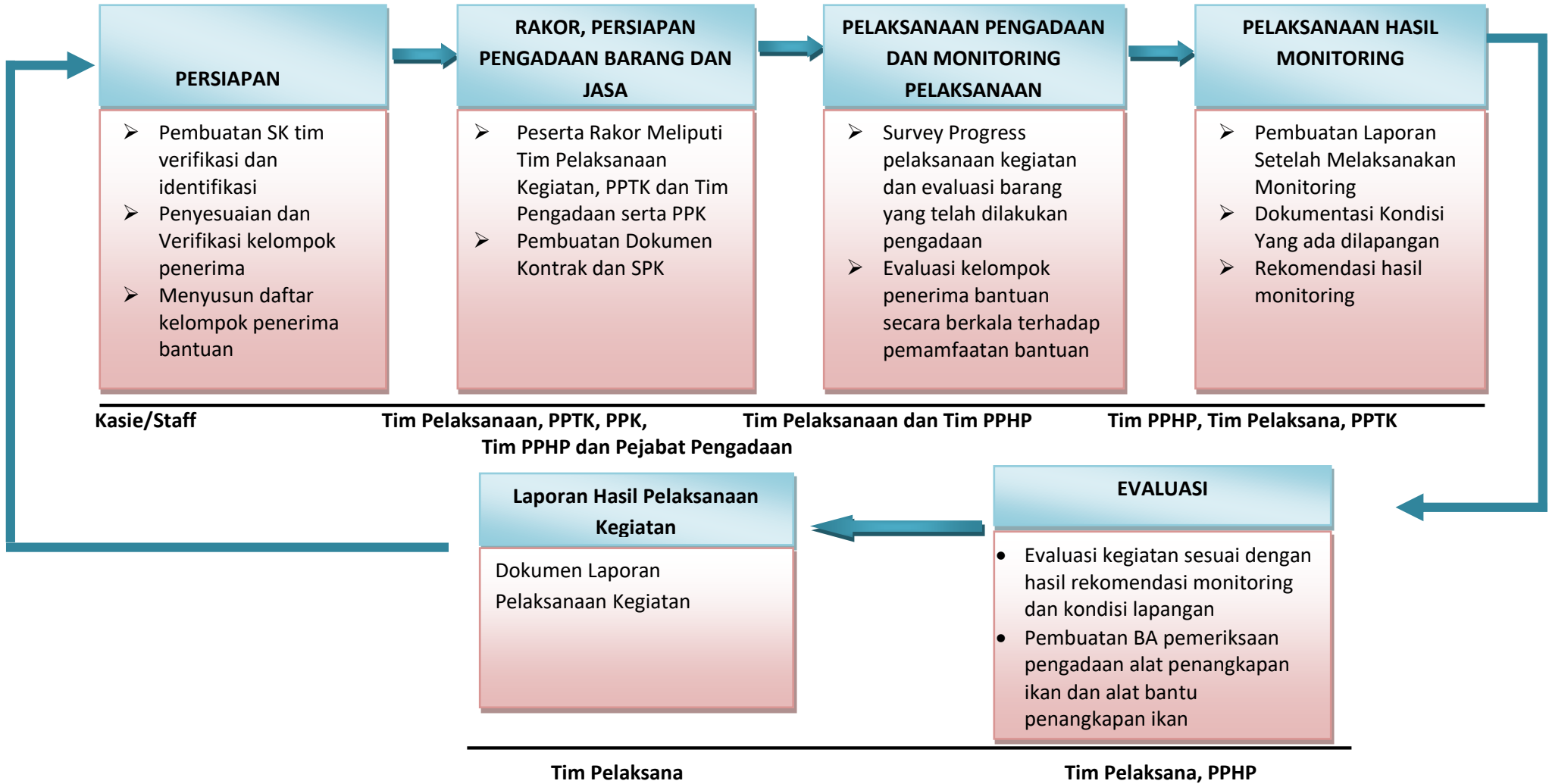
**PROSES BISNIS MANAJERIAL  
DINAS PERIKANAN**



LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP

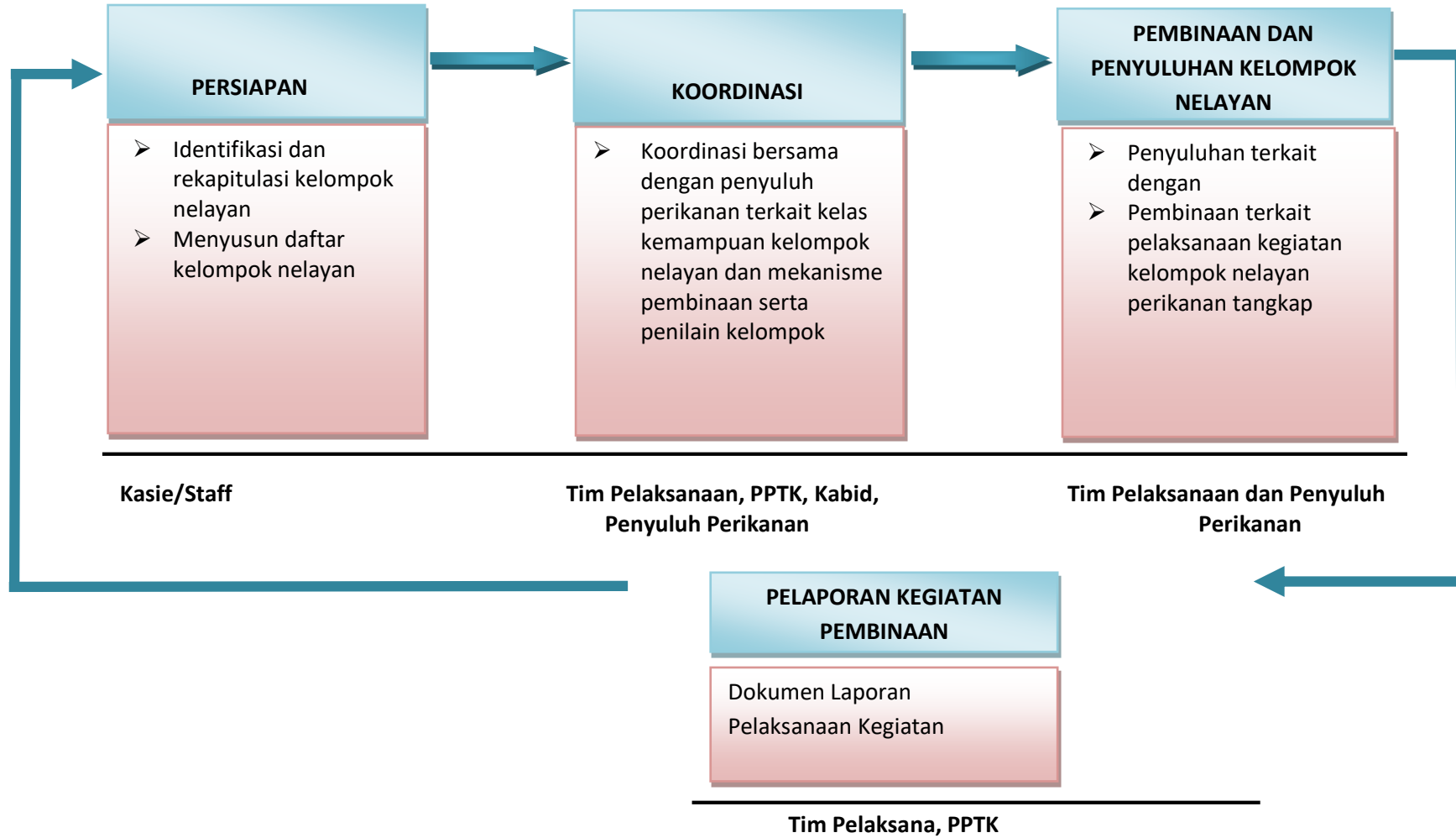
P.4.1.1 PENGGUNAAN ALAT BANTU DAN PENANGKAPAN IKAN YANG MODERN DAN RAMAH LINGKUNGAN

ESELON IV



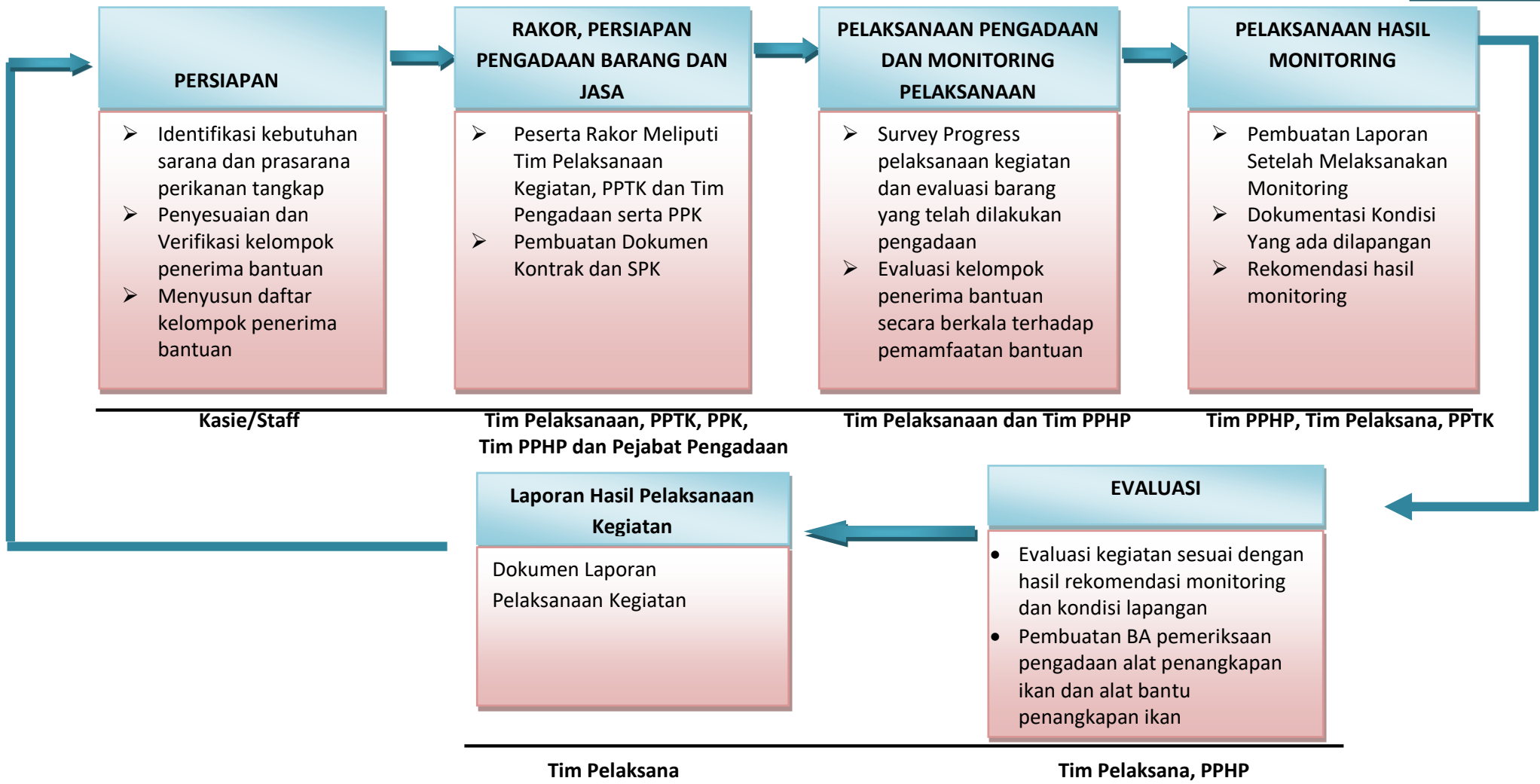
LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP  
 P.4.1.2 PENINGKATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK NELAYAN

ESELON IV

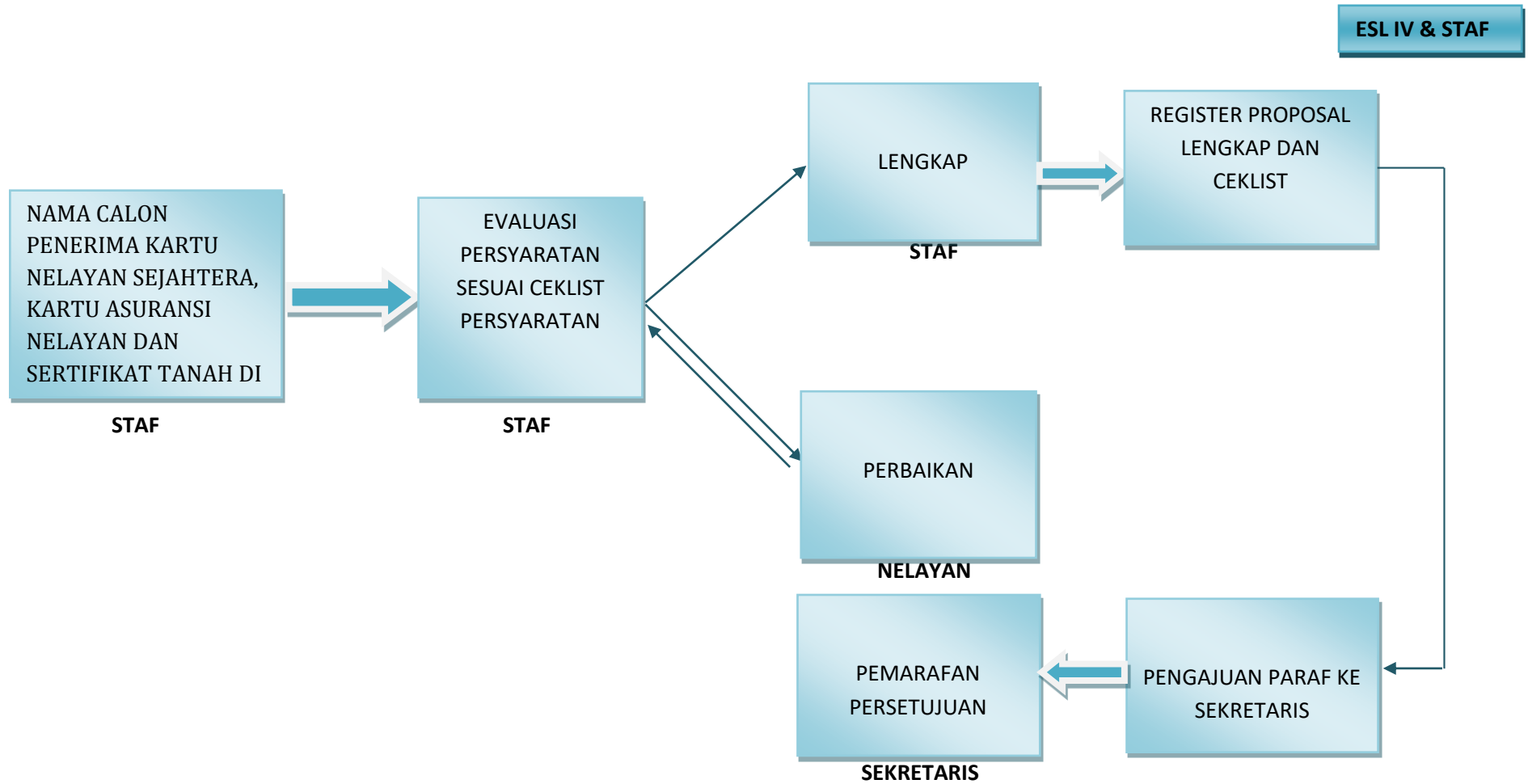


LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP  
 P.4.1.3 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP YANG BAIK

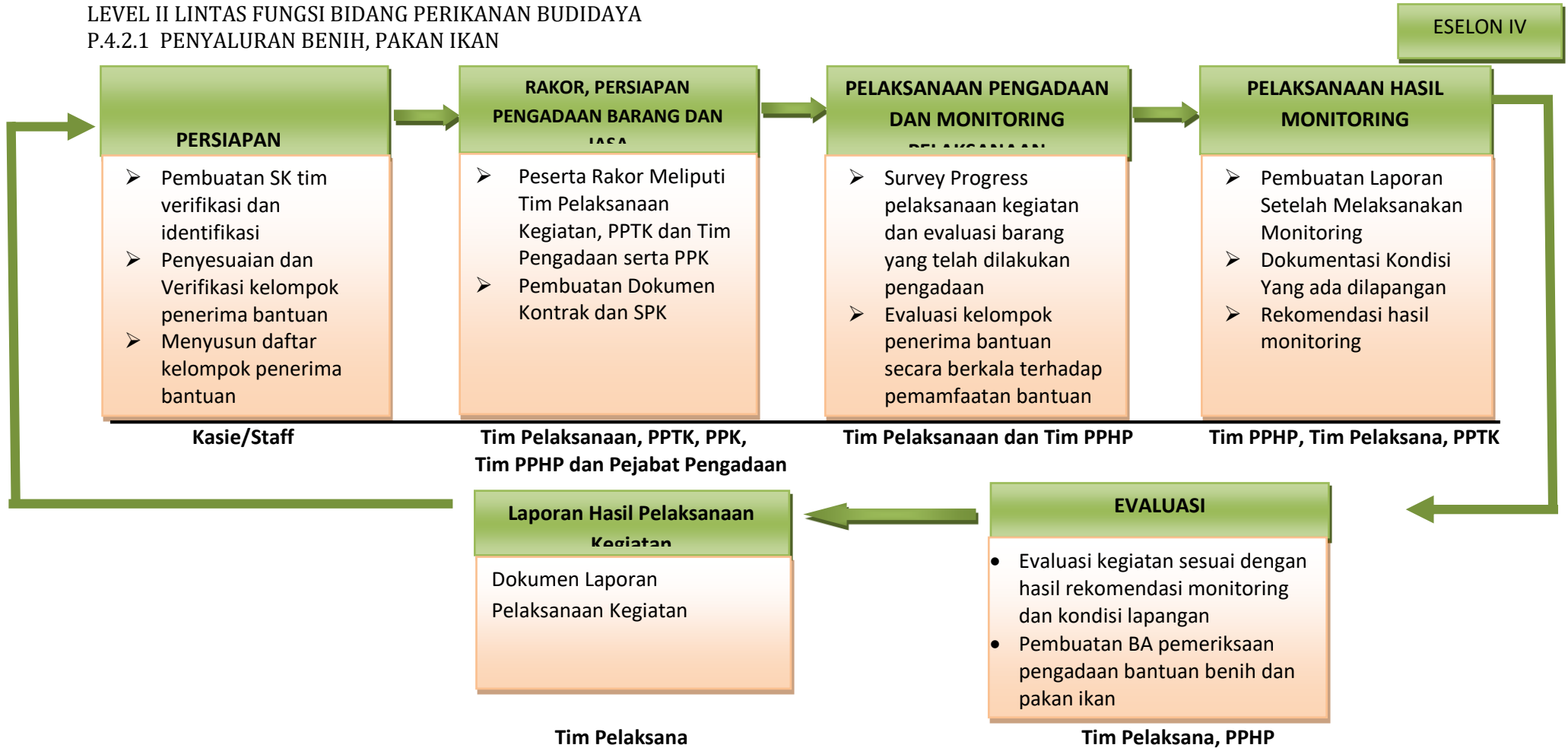
ESELON IV



LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP  
 P.4.1.4 PEMBERIAN KARTU NELAYAN SEJAHTERA, ASURANSI NELAYAN, SERTIFIKAT TANAH

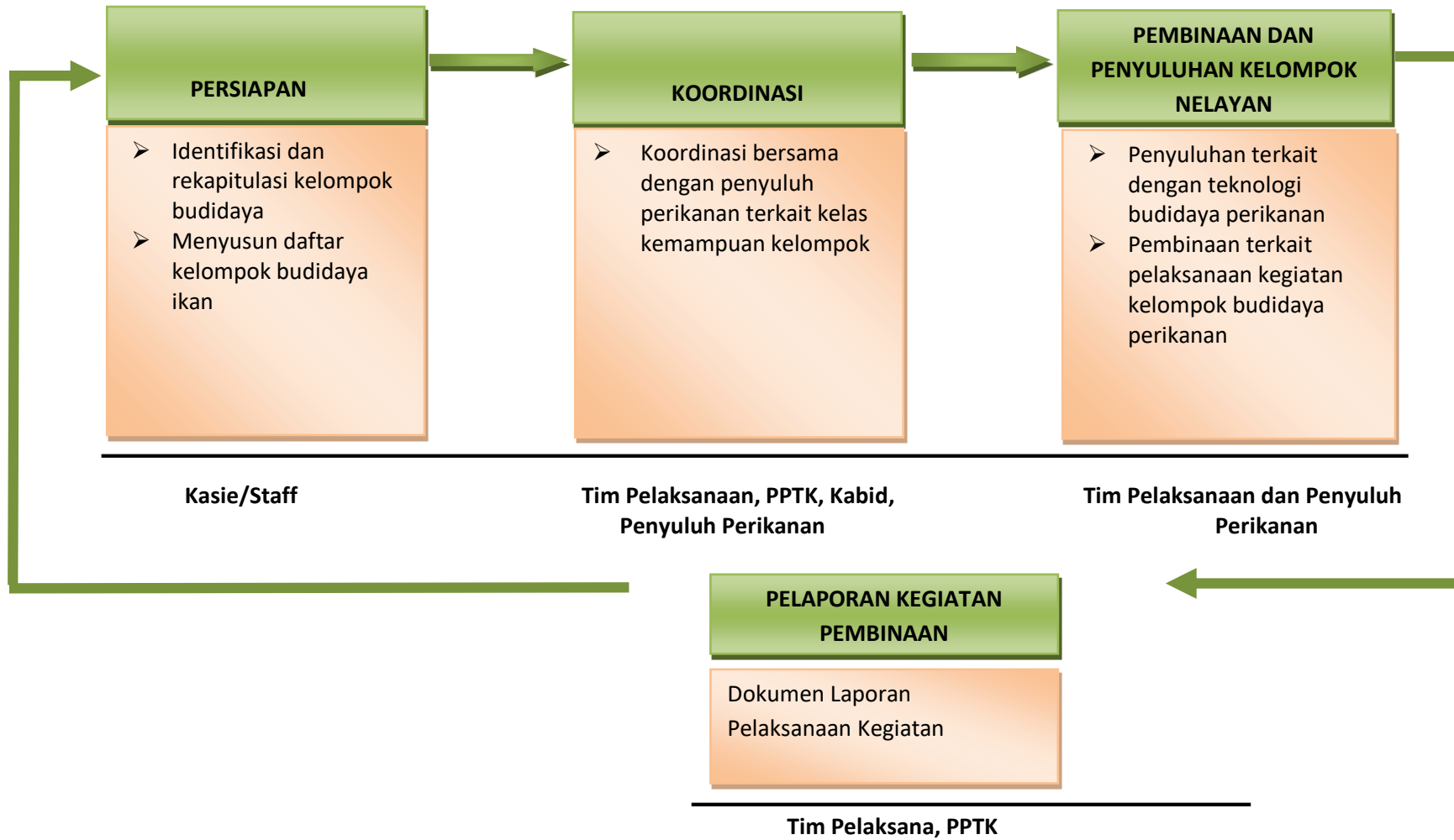


LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA  
 P.4.2.1 PENYALURAN BENIH, PAKAN IKAN



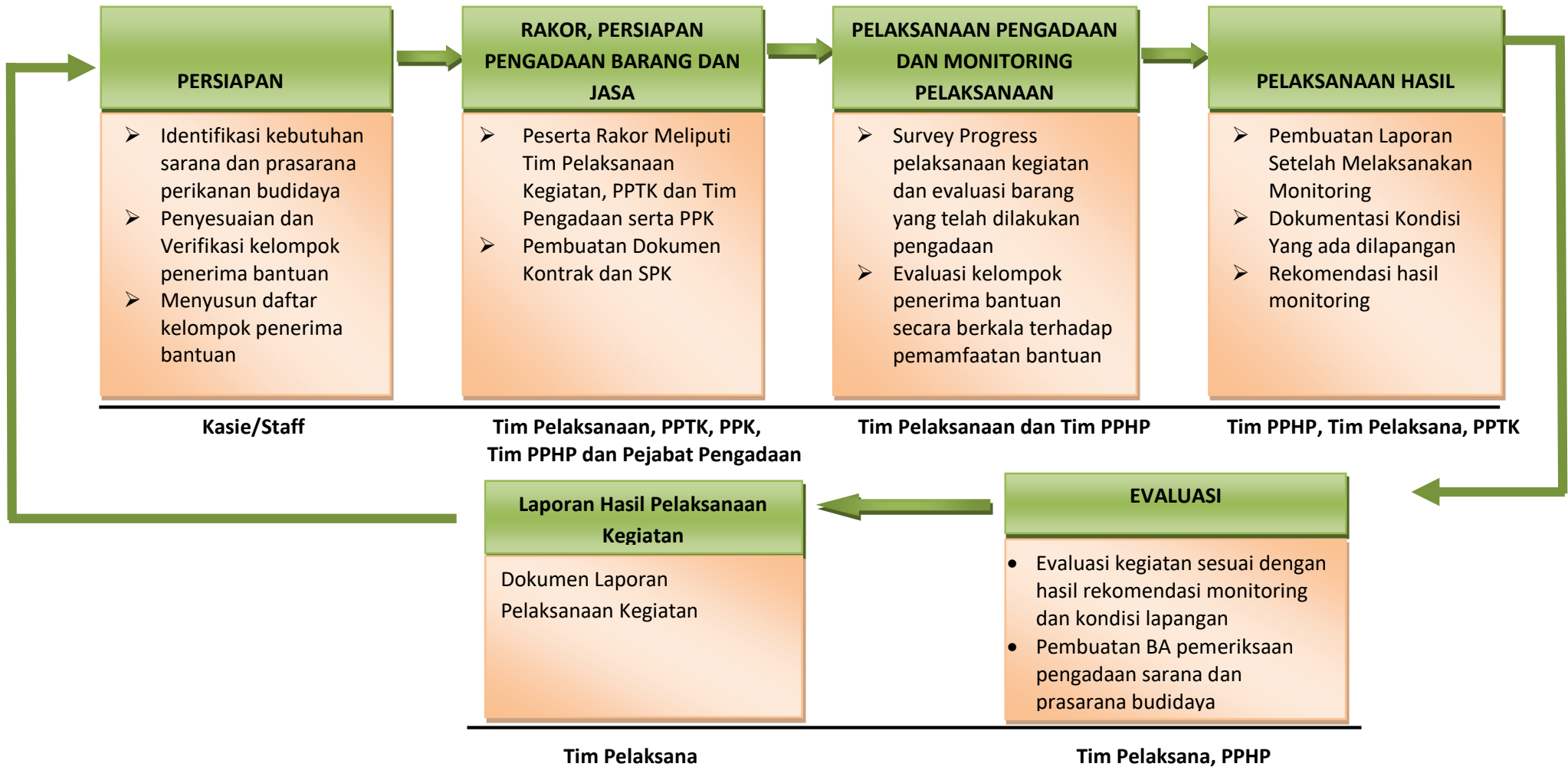
LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANANBUDIDAYA  
 P.4.2.2 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK BUDIDAYA

ESELON IV



LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA  
P.4.2.3 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA YANG BAIK

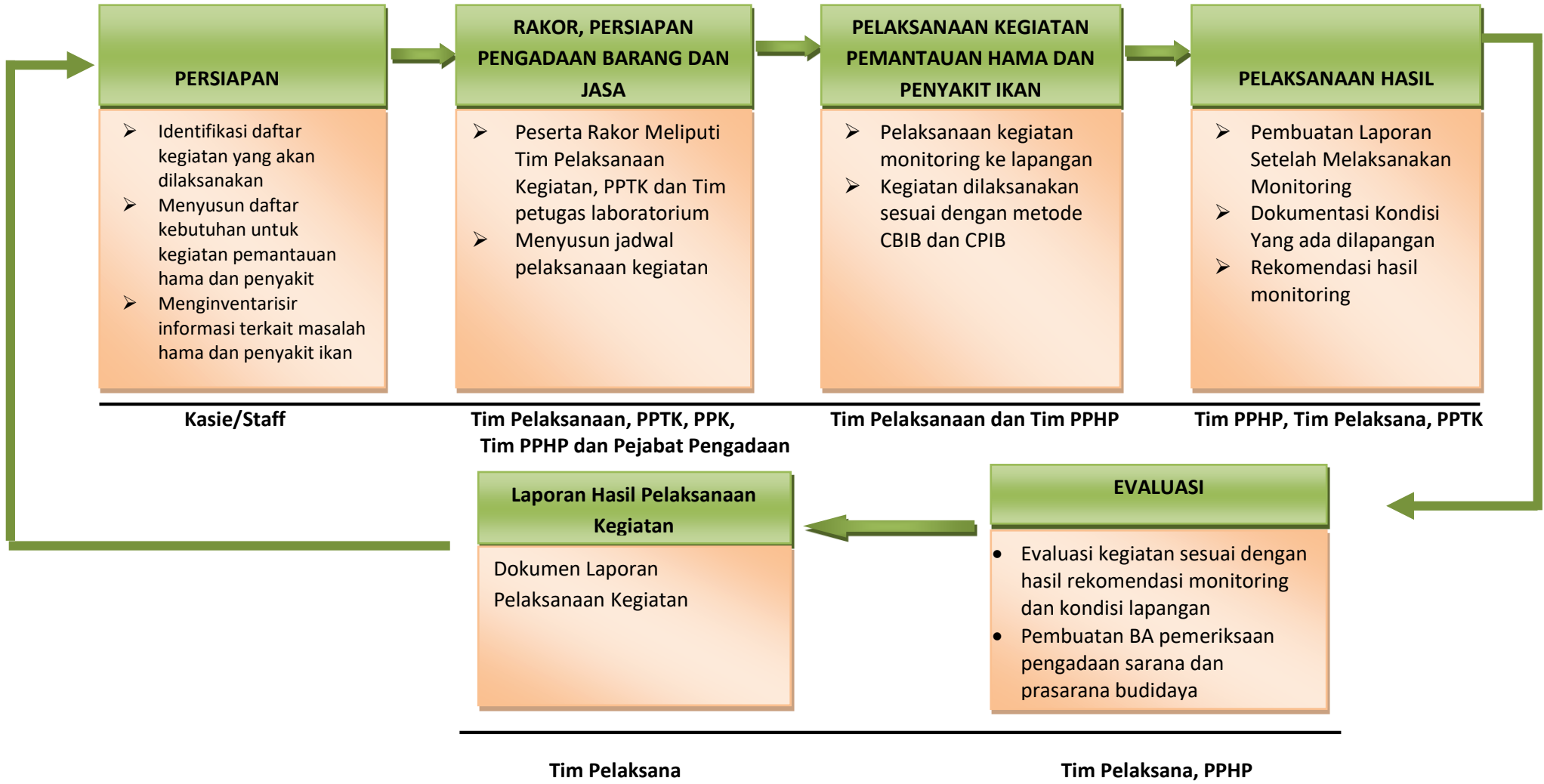
ESELON IV





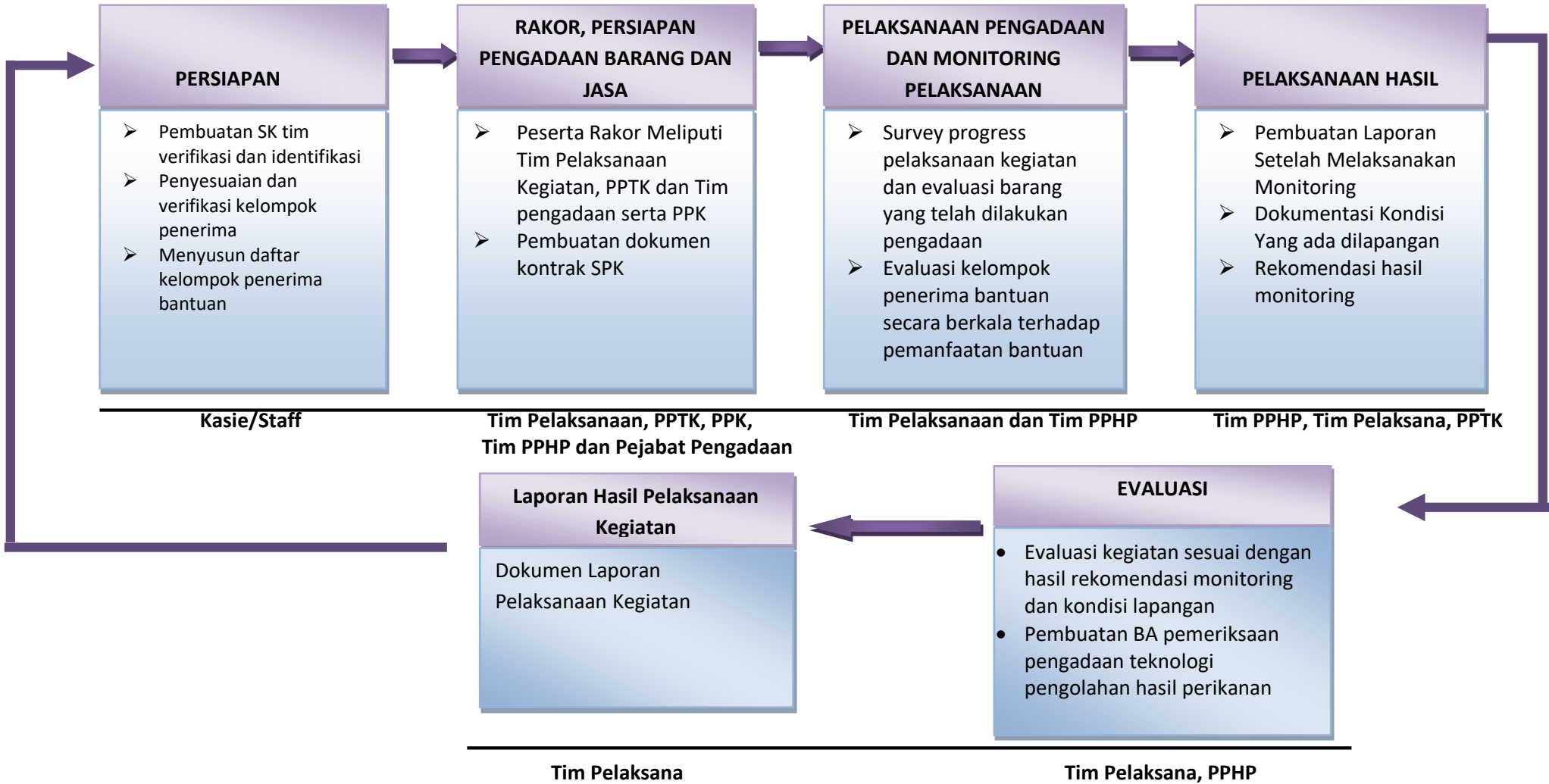
LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA  
 P.4.2.4 PENERAPAN METODE CBIB DAN CPIB

ESELON IV



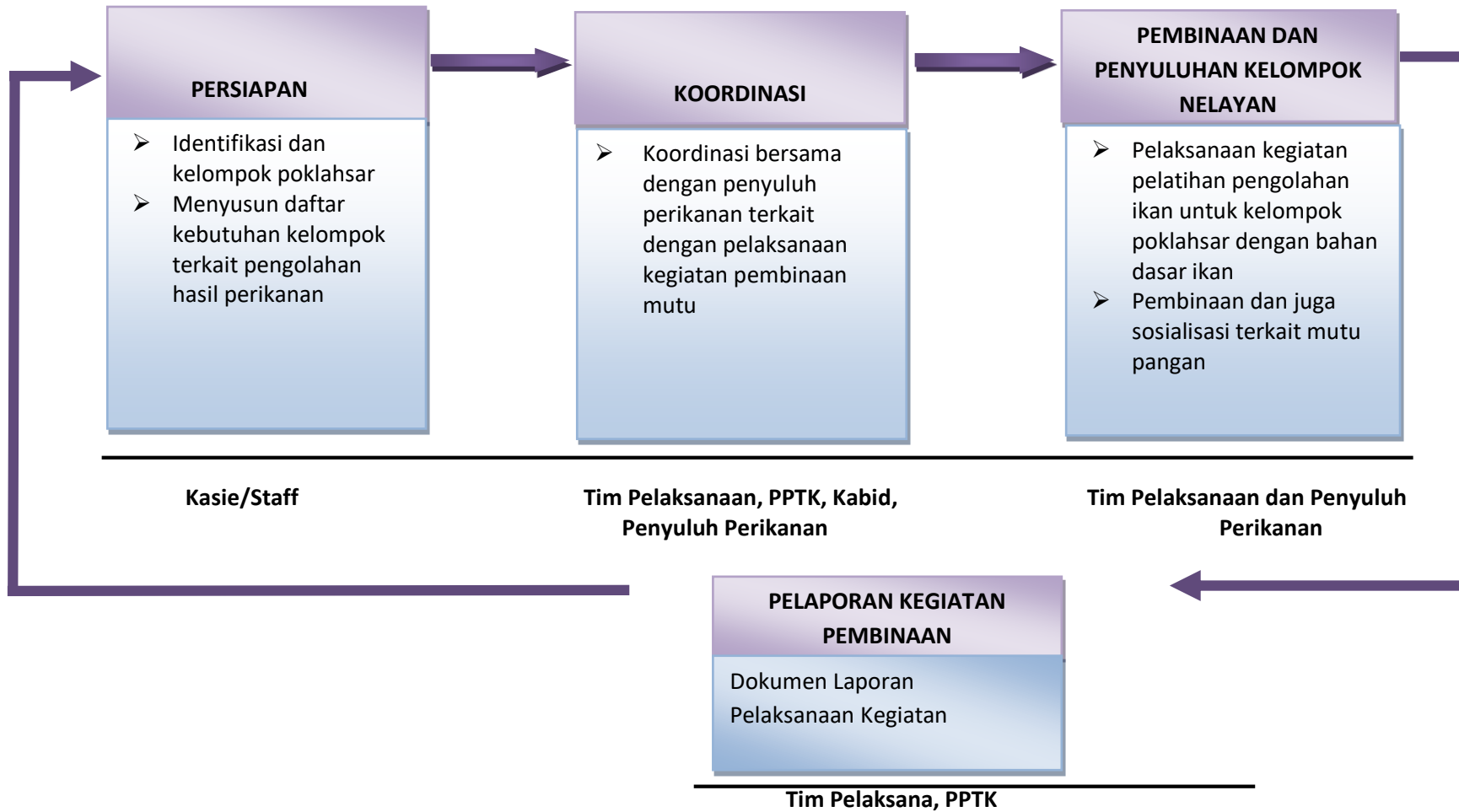
LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG DATA, USAHA PERIKANAN DAN GARAM  
 P.5.1.1 TERLAKSANANYA TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

ESELON IV



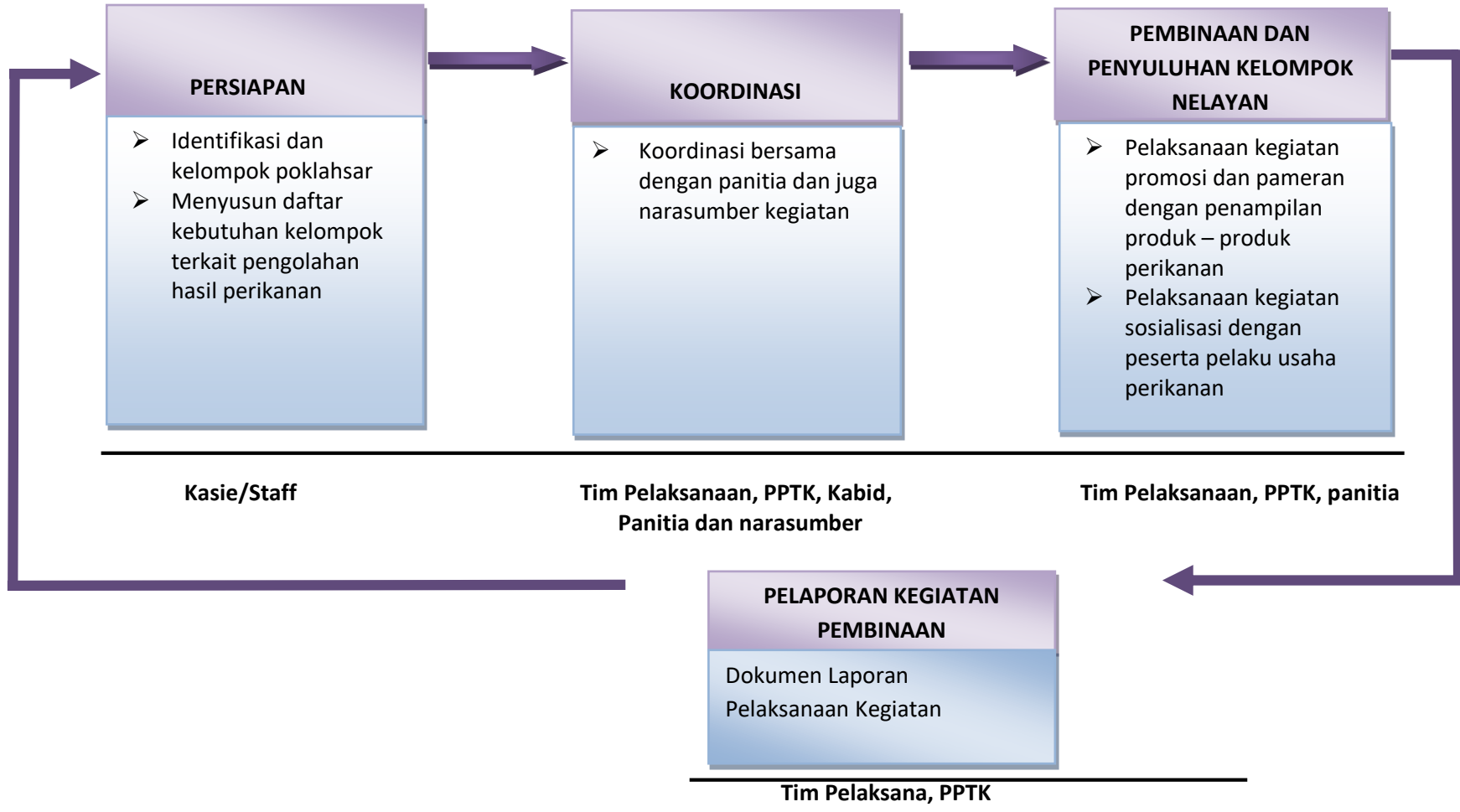
LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG DATA, USAHA PERIKANAN DAN GARAM  
 P.5.1.2 PEMBINAAN MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

ESELON IV



LEVEL II LINTAS FUNGSI BIDANG DATA, USAHA PERIKANAN DAN GARAM  
 P.5.1.3 PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

ESELON IV



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kineja

##### A. Rencana Strategis

**TUJUAN :**

**“Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perikanan”**

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, maka sasaran strategis yang dilaksanakan adalah :

**SASARAN :**

**“ Meningkatkan produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan”**

Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
3. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)
4. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)
5. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (Laut) dan (PUD)
6. Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dan garam
7. Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program atau kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta bPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemberin Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **B. Rencana Kerja Tahun 2021**

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2021. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021. Rencana kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2021.

### **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang diletakkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	1. Nilai Tukar	
		a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103
		b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105
		c. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)	117
		d. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	100
		2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	
		a. Laut	5,86%
		b. PUD	7,75%
		3. Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dan garam	
		a. Budidaya	22,34%
		b. Garam	7,20%
		4. Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	8,14%

Untuk mewujudkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 tersebut, upaya peningkatannya didukung program yang didanai APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.720.746.331,00	Sumber Dana DAU
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 730.792.916,00	Sumber Dana DAU + DAK
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.054.369.445,00	Sumber Dana DAU
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 313.562.947,00	Sumber Dana DAU

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 6.819.471.639,00 yang digunakan untuk melaksanakan 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut:

**Tabel 2. Program/Kegiatan Dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021**

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6,819,471,639</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,720,746,331</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24,717,482</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,987,594
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,955,605
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,977,089



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,885,940
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,957,678
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,953,576
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,636,065,909</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,594,223,325
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,852,108
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,998,194
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,997,594
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,994,688
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>248,879,417</b>
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	248,879,417
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>285,157,763</b>
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,272,466
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,035,677
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,099,500
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
18	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,000,000
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172,950,120
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28,530,300</b>
20	Pengadaan Mebel	0
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,530,300
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>209,298,978</b>
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,360,881
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,234,097
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126,704,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288,096,482</b>
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,300,000
26	Pemeliharaan Mebel	0
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,100,000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214,696,482
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>0</b>
29	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>730,792,916</b>
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>646,494,278</b>
30	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7,408,000
31	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	517,126,264
32	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	121,960,014
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84,298,638</b>
33	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	78,468,702
34	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5,829,936
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2,054,369,445</b>
	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>941,122,009</b>
35	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	898,451,795
36	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	42,670,214
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1,113,247,436</b>
37	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77,981,487

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
38	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,030,065,380
39	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,200,569
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>313,562,947</b>
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>112,917,029</b>
40	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112,917,029
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>174,134,118</b>
41	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	174,134,118
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>26,511,800</b>
42	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
43	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26,511,800
<b>Jumlah</b>		<b>6,819,471,639</b>

Sumber anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dari APBD DAU dan DAK.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2021**

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2021, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan Kabupaten Sampang.

Adapun pencapaian tujuan dari dinas Perikanan Kabupaten sampan hingga tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**TUJUAN :**  
**“Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perikanan”**

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja yaitu Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan dan Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, dan Pengolah Hasil Perikanan. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1 : Pengukuran Capaian Indikator Tujuan Dinas Perikanan tahun 2021**

No	Uraian Tujuan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Capaian (%)
					2020	2021	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perikanan	1.1	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan (%)				
		1.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103	100,1	102	99,02
		1.3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105	105	104	99,04
		1.4	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPg)	117	50	70	59,82
		1.5	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	100	n/a	121,54	121,54

Berdasarkan tabel di atas dan berdasarkan perhitungan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan (%)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen). PDRB perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka ini menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (it) dan indeks harga yang dibayar nelayan (ib). standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100. NTN > 100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. NTN < 100, kenaikan harga produksi lebih rendah

dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Target NTN pada tahun 2021 adalah sebesar 103 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu 102 tidak tercapai. Namun, realisasi NTN pada tahun 2021 sebesar 102 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.8%. Hal ini karena beberapa komoditas ikan harga naik yang menyebabkan nilai produksi meningkat.

### 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil budidaya terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Secara definitif, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target NTPI pada tahun 2021 adalah sebesar 105 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu 104 mengalami penurunan. Realisasi NTPi pada tahun 2021 sebesar 104 atau capaiannya sebesar 99,04%.

### 4. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPig)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target NTPG pada tahun 2021 adalah 117 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 70 tidak tercapai. Realisasi NTPG pada tahun 2021 sebesar 70 atau capaiannya sebesar 59,82%

### 5. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target NTPHP pada tahun 2021 adalah 100 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 121,54 tercapai. Realisasi NTPHP pada tahun 2021 sebesar 121,54 atau capaiannya sebesar 121,54%

**SASARAN STRATEGIS :**

**SASARAN :**  
**“Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan dan Pendapatan  
 Pelaku Usaha Perikanan”**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (laut) dan (PUD), Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan garam, dan peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan.

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	REALISASI	
					2020	2021
1	Meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap laut (%)	2,5	1,5	(0,45)
			Jumlah produksi perikanan tangkap laut (ton)	15.530,5	15.151,50	15.083,48
		1.2	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap PUD (%)	2,3	-34,6	16,12
			Jumlah produksi perikanan tangkap PUD (ton)	15,9	15,6	18,6

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2021**

Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	15.530,5 ton	15.083,48 ton	97,12%	730.792,916	612.266,724	83,78 %
	Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)	15,9 ton	18,6 ton	116,98 %			



**Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program	Indikator	% Capaian Kinerja Th 2021	% Penyerapan Anggaran Th 2021	% Tingkat Efisiensi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (laut)	97,12%	83,78 %	
	Jumlah produksi perikanan tangkap (PUD)	116,98 %	83,78 %	

Produksi Perikanan Tangkap adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami yang terdiri dari Laut dan perairan umum daratan ( Waduk, Rawa, Sungai, Danau dan Genangan Air lainnya).

Capaian Produksi Perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 15.102,08 yang terdiri dari produksi perikanan tangkap laut sebesar 15.083,48 ton dan Produksi perikanan tangkap perairan umum daratan ( PUD ) sebesar 18,6 ton, jika dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 15.167,10 mengalami penurunan sebesar 65,02 ton atau 0,43 % dan realisasi terhadap target sebesar 97,14 %.

Penurunan volume produksi perikanan tangkap dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan tangkap ( Laut dan PUD ) yang dilakukan oleh nelayan hal ini disebabkan karena penggunaan alat tangkap yang masih belum efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut program dan kegiatan Dinas Perikanan diarahkan pada upaya pemberdayaan nelayan kecil salah satunya melalui pemberian Hibah Alat penangkapan ikan ramah lingkungan yang di harapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan di laut dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan. Disamping upaya pemberdayaan Nelayan, Dinas Perikanan juga mengajukan program kegiatan yang sifatnya memperbaiki dan merehabilitasi sumberdaya ikan ( SDI ) di Laut Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui pengadaan Rumah Ikan ( Fish Apartement ) dan Terumbu Karang Buatan ( TKB ).

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang melalui kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap serta

menjamin kelangsungan usaha nelayan dengan kegiatan penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan, diversifikasi usaha penangkapan ikan. Pengenalan alat - alat tangkap ramah lingkungan juga selalu disosialisasikan kepada masyarakat nelayan dalam berbagai kesempatan dengan harapan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan dapat terus terjaga.

Produksi perikanan tangkap di perairan umum dapat ditingkatkan, salah satunya melalui program restocking. Namun perlu diketahui, bahwa program ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum, yang terpenting bagaimana upaya berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan, misal dengan tidak membuang limbah berbahaya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Upaya tersebut harus selalu dilakukan, didukung dengan selalu memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat akan manfaat menjaga kelestarian lingkungan perairan, sehingga ikan yang hidup di sungai dapat tinggal dan berkembang biak dengan aman dan nyaman.

Guna menunjang dalam usaha penangkapan ikan, pada tahun 2021 Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang memberikan bantuan atau hibah kepada nelayan berupa jarring dan mesin kapal. Semakin baik kondisi prasarananya maka semakin lancar pula proses penjualan hasil tangkapan. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan usaha penangkapan ikan oleh nelayan.



**Gambar 3.1 Hibah Jaring Gill Net**



**Gambar 3.2 Hibah Mesin Kapal**

Dengan adanya bantuan hibah berupa jarring dan mesin kapal bagi nelayan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan dapat mengurangi biaya operasional bagi nelayan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.



**Gambar 3.3 Hibah life jacket**

Dengan adanya bantuan hibah life jacket resiko terjadi korban saat kecelakaan dilaut dapat diminimalisir dan menjaga keselamatan nelayan saat melaut.

**Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dan Garam**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	REALISASI	
					2020	2021
1	Meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	1.1	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2,3	25	-14,94
			Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	979	1.050,52	893,493
		1.2	Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)	2,3	-43,26	-14,11
			Jumlah produksi garam rakyat (ton)	291.000	174.598	149.947

**Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2021**

Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan budidaya	979 ton	893,493 ton	91,26%	2.054.3 69.445	1.944.554. 925	94,65 %
	Jumlah produksi garam rakyat	291.000 ton	149.947 ton	51,52%			

**Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program	Indikator	% Capaian Kinerja Th 2021	% Penyerapan Anggaran Th 2021	% Tingkat Efisiensi
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	91,26%	94,65 %	
	Jumlah produksi garam rakyat	51,52%	94,65 %	

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 893,493 ton jika dibandingkan dengan target capaian produksi perikanan budidaya sebelum ada

perubahan renstra atau RPJM sebesar 890 ton telah tercapai, tapi karena ada revisi renstra/RPJM di akhir tahun 2021 menjadi 979 ton sehingga capaian produksi tidak tercapai. Capaian produksi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1.050,52 ton mengalami penurunan sebesar 157,027 ton dan realisasi terhadap target sebesar 91,26 %. Penurunan volume produksi perikanan budidaya dikarenakan ada penurunan produksi pada komoditas budidaya air payau komoditas udang vaname. Dari beberapa komoditas hasil produksi budidaya seperti udang vaname, bandeng dan lele hanya komoditas udang vaname yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 hal ini dikarenakan banyaknya timbul penyakit AHPND (*Acute Hepatopancreatic Necrosis Diseases*) yang menyebabkan kematian yang banyak dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal lingkungan budidaya perikanan.

Produksi garam rakyat pada tahun 2021 sebesar 149,947 ton, jika dibandingkan dengan capaian produksi budidaya garam pada tahun 2020 sebesar 174,598 ton mengalami penurunan dan realisasi terhadap target sebesar 51,52 %. Penurunan produksi garam rakyat dan tidak tercapainya target produksi disebabkan karena harga garam anjlok yang mengakibatkan biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang didapat, sehingga berakibat pada penurunan minat petambak garam untuk melakukan produksi garam. Disamping itu adanya peralihan fungsi lahan budidaya garam menjadi lahan budidaya ikan atau udang yang lebih menguntungkan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian stimulant berupa paket hibah produksi, sarana prasarana dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya, pembangunan dan rehabilitasi sarana pan prasarana perikanan budidaya, pelatihan/sosialisasi CBIB kepada kelompok budidaya perikanan, monitoring hama dan penyakit ikan, kandungan residu, lingkungan budidaya serta pemantauan peredaran dan pemakaina pakan dan obat ikan.



**Gambar 3.4 Pembenuhan Lele di Desa Ragung Pangarengan**



**Gambar 3.5 Kampung Siongan Desa Napo Laok Omben**



**Gambar 3.6 Budidaya Nila Salin Desa Ragung Pangarengan**



**Gambar 3.7 Hibah Sarana Prasarana Jalan Produksi**

Tahun 2021 produksi perikanan budidaya menurun sebesar -14,94 dengan tingkat capaian sebesar 91,26% dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini bukan tanpa alasan. Mulai Tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan yang dialami pembudidaya ikan. Mulai dari teknik budidaya ikan yang baik dan benar, perbaikan sarana dan prasarana, pemberian bantuan, sampai dengan kemudahan dalam mengakses permodalan. Sehingga dengan hal tersebut, minat para pembudidaya dalam menjalankan dan mengembangkan usaha perikanan budidaya dapat terus meningkat.

**Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	
				2020	2021
1	Meningkatnya produksi sektor perikanan dan pendapatan pelaku usaha perikanan	1.1 Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	8,14%	(21,54)	17,72

**Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2021**

Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah	19,5 %	35,18%	180,41%	313.562 .947	281.736.7 37	89,85 %
	Konsumsi ikan perkapita	32.89 kg/kpt /th	54,62 kg/kpt/th	166,06%			
	Jumlah produk olahan ikan yang bermutu	3 produk	3 produk	100%			

**Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program	Indikator	% Capaian Kinerja Th 2021	% Penyerapan Anggaran Th 2021	% Tingkat Efisiensi
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah	180,41%	89,85 %	
	Konsumsi ikan perkapita	166,06%	89,85 %	
	Jumlah produk olahan ikan yang bermutu	100%		

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa angka konsumsi ikan di Tahun 2021 adalah sebesar 54,62 kg/kapita/tahun. Sedangkan di Tahun 2020 hanya sebesar 31,59 kg/kapita/tahun. Apabila dibandingkan dengan target per tahun, pencapaian angka konsumsi ikan Tahun 2021 mencapai 166,06 % dari target.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sampang diantaranya dengan rutin tiap tahun mengadakan kegiatan Gemar Makan Ikan. Kegiatan ini mengedukasi kepada masyarakat akan pentingnya makan ikan dengan segala bentuk olahannya. Kegiatan tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang.

Selain itu, diadakan pula kegiatan-kegiatan yang mengedukasi para pengolah dan pemasar hasil perikanan, mulai dari pelatihan teknologi penanganan produk ikan segar, temu aplikasi teknologi pengelolaan hasil



perikanan, sampai dengan pertemuan rutin pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Sebab, pada dasarnya kebutuhan protein hewani yang murah dan berkualitas terdapat pada produk perikanan. Oleh sebab itu sosialisasi harus terus digalakkan dalam berbagai program dan kegiatan harapannya tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Sampang terhadap produk ikan dan olahannya dapat menyamai bahkan mengungguli target angka konsumsi ikan nasional.



**Gambar 3.8 Kegiatan Pelatihan Packaging**

Pelatihan Packaging ini dilaksanakan di aula Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Dengan mengundang 8 Kecamatan potensi pengolah dan pemasar hasil perikanan. Output kegiatan ini untuk memberikan pelatihan sekaligus informasi packaging / kemasan dari masing-masing produk Poklahsar. Kegiatan ini mendatangkan narasumber dari rumah kemasan besar kabupaten Mojokerto. Packaging/ kemasan sangatlah penting untuk keawetan, daya tarik dan penyebaran pangsa pasar bagi poklahsar. Dengan kemasan/ packaging yang baik dengan memenuhi syarat-syarat kesehatan dan uji keamanan pangan akan menentukan pola pangsa pasar dari masing – masing poklahsar.



**Gambar 3.9 Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan**

Pelatihan Pengolahan Ikan ini pada tahun 2021 dilaksanakan di 7 Kecamatan ( Omben, ketapang, Banyuates, Sokobanah, Camplong, Pangarengan dan Kedungdung ) dengan sasaran kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain memberikan informasi kepada poklhasar tentang diversifikasi olahan produk perikanan, memberikan pengetahuan tentang pentingnya makan ikan ikan, meningkatkan pendapatan / income keluarga dan memperluas pangsa pasar.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2021 pada sub kegiatan pelatihan bimbingan bagi usaha kecil / mikro dengan mendatangkan narasumber yang sudah terlatih dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan hasil tangkapan ikan baik dari laut, pud, tambak dan kolam tidak hanya dipasarkan dalam keadaan segar dan beku saja melainkan di jual dalam bentuk produk olahan kering, basah dan frozen untuk menambah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.





**Gambar 3.10 Kegiatan Buyer Meet Seller**

Kegiatan Buyers Meet Sellers (BMS) dilaksanakan tanggal 1 Desember 2021 di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Dengan mengundang 8 Kecamatan potensi pengolah dan pemasar hasil perikanan. Kegiatan ini dibuka oleh bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang dan dihadiri juga oleh ketua Forikan (diwakili oleh Ibu Wakil Bupati) dan ibu Ketua Dharma Wanita dan Anggota. Gathering Buyers Meet Sellers selain menampilkan produk untuk dipamerkan juga anggota poklhasr lainnya mendapatkan informasi dari narasumber yang didatangkan dari PT Alfamart Sidoarjo. Tujuan kegiatan ini secara tidak langsung adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk mengenalkan produk masing- masing poklhasr dan memperluas pangsa pasar demi keberlangsungan produk poklhasr itu sendiri.

Pelatihan Pengolahan Ikan, Pelatihan Packaging dan Gathering Buyers Meet Sellers (BMS) itu semua merupakan program prioritas bidang pengolahan usaha perikanan dan merupakan tujuan utama untuk meningkatkan konsumsi ikan.

### **3.2 Capaian Kinerja Anggaran**

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan di DPPA APBD tahun 2021. Adapun jumlah APBD Dinas

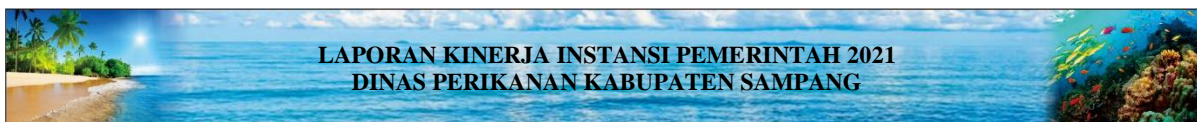
Perikanan Kabupaten Sampang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.819.471.639 dan terealisasi sebesar Rp. 6.314.362.074 atau mencapai 92,59 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.720.746.331
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 730.792.916
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 2.054.369.445
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 313.562.947

Capaian kinerja anggaran pada masing-masing program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Jumlah Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2021**

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6,819,471,639</b>	<b>6,314,362,074.00</b>	<b>92.59</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,720,746,331</b>	<b>3,475,803,688.00</b>	<b>93.42</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24,717,482</b>	<b>17,411,000.00</b>	<b>70.44</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,987,594	2,920,000.00	97.74
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,955,605	2,820,000.00	95.41
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,977,089	2,897,500.00	97.33
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,885,940	0.00	0.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,957,678	2,859,500.00	96.68
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,953,576	5,914,000.00	59.42
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,636,065,909</b>	<b>2,485,757,236.00</b>	<b>94.30</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,594,223,325	2,447,494,236.00	94.34
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,852,108	30,468,000.00	92.74
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	2,998,194	2,525,000.00	84.22



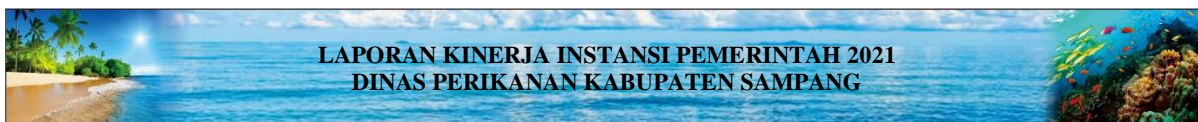
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

	Keuangan SKPD			
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,997,594	2,355,000.00	78.56
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,994,688	2,915,000.00	97.34
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>248,879,417</b>	<b>202,468,000.00</b>	<b>81.35</b>
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0.00	0.00
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	248,879,417	202,468,000.00	81.35
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>285,157,763</b>	<b>281,554,181.00</b>	<b>98.74</b>
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,272,466	12,641,500.00	95.25
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,035,677	63,747,475.00	99.55
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,099,500	21,038,000.00	99.71
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000	1,550,000.00	86.11
18	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,000,000	11,975,000.00	99.79
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172,950,120	170,602,206.00	98.64
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28,530,300</b>	<b>26,509,089.00</b>	<b>92.92</b>
20	Pengadaan Mebel	0	0.00	0.00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,530,300	26,509,089.00	92.92
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>209,298,978</b>	<b>185,445,111.00</b>	<b>88.60</b>
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,360,881	7,114,350.00	85.09
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,234,097	51,639,761.00	69.56
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126,704,000	126,691,000.00	99.99



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288,096,482</b>	<b>276,659,071.00</b>	<b>96.03</b>
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,300,000	36,587,791.00	82.59
26	Pemeliharaan Mebel	0	0.00	0.00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,100,000	28,069,000.00	96.46
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214,696,482	212,002,280.00	98.75
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	0.00	0.00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>730,792,916</b>	<b>612,266,724.00</b>	<b>83.78</b>
	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>646,494,278</b>	<b>539,648,788.00</b>	<b>83.47</b>
30	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7,408,000	7,408,000.00	100.00
31	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	517,126,264	473,361,038.00	91.54
32	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	121,960,014	58,879,750.00	48.28
	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84,298,638</b>	<b>72,617,936.00</b>	<b>86.14</b>
33	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	78,468,702	67,028,000.00	85.42
34	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5,829,936	5,589,936.00	95.88
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2,054,369,445</b>	<b>1,944,554,925.00</b>	<b>94.65</b>
	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>941,122,009</b>	<b>846,560,000.00</b>	<b>89.95</b>
35	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	898,451,795	804,031,000.00	89.49
36	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	42,670,214	42,529,000.00	99.67



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SAMPANG**

	Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan			
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1,113,247,436</b>	<b>1,097,994,925.00</b>	98.63
37	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77,981,487	76,418,200.00	98.00
38	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,030,065,380	1,017,550,675.00	98.79
39	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,200,569	4,026,050.00	77.42
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>313,562,947</b>	<b>281,736,737.00</b>	89.85
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>112,917,029</b>	<b>109,412,800.00</b>	96.90
40	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112,917,029	109,412,800.00	96.90
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>174,134,118</b>	<b>150,428,500.00</b>	86.39
41	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	174,134,118	150,428,500.00	86.39
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>26,511,800</b>	<b>21,895,437.00</b>	82.59
42	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0.00	0.00
43	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26,511,800	21,895,437.00	82.59
<b>Jumlah</b>		<b>6,819,471,639</b>	<b>6,314,362,074.00</b>	92.59



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan Kabupaten Sampang sebagaimana berikut :

1. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan Pembangunan Perikanan Daerah;
2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan perikanan;
3. Masih minimnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan budidaya
4. Masih kurangnya sarana prasarana bidang Perikanan
5. Lemahnya kesadaran pengolah hasil perikanan tentang pentingnya produk olahan ikan yang higienis dan bermutu.
6. Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan teknis di bidang Perikanan
7. Optimalisasi sistem Pengendalian dan evaluasi perencanaan program Perikanan
8. Pelayanan Publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
9. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan social bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
10. Bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan dan peran pembudidaya ikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
11. Masih rendahnya akses permodalan, sarana/alat, rantai distribusi dan kelembagaan pada usaha kecil bidang perikanan.
12. Rendahnya teknologi dan diversifikasi pengolahan produk hasil perikanan.
13. Belum tersedianya data yang akurat dan memadai bidang perikanan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

